

Analisis Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Fanesha Dwi Lestari¹, H.D Kasmat Djuanta², Marti Dewi Ungkari³

Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Garut

Email : 24022115170@fekon.uniga.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Analisis penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut dilihat dari tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data sekunder yakni diperoleh dari data mengenai profil sekolah dan data mengenai penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dokumen lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas dengan cara triangulasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi di SDN Ranting Cipancar dapat dikatakan baik. Dengan kata lain, penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS tahun 2018.

Kata Kunci: Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi

1. Pendahuluan

Organisasi sektor publik adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertugas memberikan pelayanan yang bersifat menguntungkan bagi seluruh masyarakat (Bastian, 2017:6). Dalam menjalankan organisasi publik diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik untuk memberikan jaminan terlaksananya strategi organisasi yang efektif dan efisien. Akuntansi manajemen berperan penting dalam organisasi sektor publik salah satunya dalam aspek penganggaran. Dalam hal penganggaran, akuntansi manajemen merupakan alat yang sangat penting dalam proses pengalokasian dan pendistribusian dana publik yang ekonomis, efektif, efisien, adil, dan merata.

Dalam proses penganggaran terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi. Dimana, dalam tahapan-tahapan tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh lembaga yang terkait agar tidak terjadi kesalahan atau tindakan kecurangan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pendanaan di salah satu organisasi sektor publik yaitu sektor pendidikan. Dalam pelaksanaannya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

harus dikelola dengan baik mencakup proses penganggaran yang disesuaikan dengan anggaran sektor publik. Dalam hal ini, sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permasalahan tersebut diantaranya adanya sisa dana Bantuan Operasional (BOS) yang belum dikembalikan ke kas negara sehingga menyebabkan kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai ketentuan, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum tepat sesuai ketentuan.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 juga menyatakan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permasalahan tersebut diantaranya sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), banyak transaksi yang berada di luar kewajaran, kurangnya bukti transaksi kuat seperti kuitansi, adanya transaksi ganda, tidak ada foto dan rincian kegiatan sekolah yang memakan banyak dana, serta penggunaan dana Bantuan Operasional (BOS) cukup menyimpang jauh dari program yang disusun sekolah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah pada SDN 5 Cipancar Kecamatan Leles Kabupaten Garut tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diantaranya :

- 1) Kepala Sekolah belum menyerahkan Rencana Jangka Menengah (RJM) yang disusun empat tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 2) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN 5 Cipancar belum mendapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- 3) Bendahara BOS belum menyetorkan Jasa Giro/Bunga yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan.
- 4) Kelebihan penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1.280.000 tidak sesuai dengan ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
- 5) Terdapat pembelian printer dan buku sebesar Rp 19.788.600 belum dicatat dalam Buku Inventaris Sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul "**Analisis Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut**".

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntansi Manajemen Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut Bastian (2017:6) yang dimaksud dengan organisasi sektor publik yaitu organisasi yang memberikan layanan dasar dari pemerintah seperti polisi, militer, jalan umum, angkutan umum, pendidikan dasar, dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik hampir sama dengan prinsip akuntansi manajemen sektor swasta. Yang membedakan adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh sektor publik, sehingga penerapan teknik manajemen sektor swasta tidak dapat digunakan dalam praktik penerapan akuntansi manajemen sektor publik. (Mardiasmo, 2009:32).

2.2 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:45) Pengendalian manajemen diperlukan untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi yang efektif dan efisien. Adapun aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja.

Proses pengendalian manajemen pada sektor publik dilakukan dengan menggunakan dua saluran yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi formal mencakup perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, operasional (pelaksanaan anggaran), dan evaluasi kerja. Sedangkan, saluran komunikasi informal mencakup komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode *management by walking around*.

2.3 Penganggaran

2.3.1 Konsep Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:61) suatu penganggaran meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dimana dalam setiap tahapannya perlu dilakukan pengawasan. Pada tahap perencanaan, anggaran berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi yang didalamnya berkaitan dengan penyusunan anggaran. Pada tahap pelaksanaan, berkaitan dengan realisasi dari anggaran. Kemudian, pada tahap pelaporan dan evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas yang mencakup proses pelaporan dan penilaian kinerja.

2.4 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu (Dhani dalam Halim, 2016:224).

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan suatu organisasi publik yang baik diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik pula. Akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengendalian manajemen. Salah satu peran dari akuntansi manajemen sektor publik adalah dalam aspek penganggaran, dimana akuntansi manajemen merupakan alat yang sangat penting untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.

Menurut Mardiasmo (2009:61) suatu penganggaran meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dimana dalam setiap tahapannya perlu dilakukan pengawasan. Pada tahap perencanaan, anggaran berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi yang didalamnya berkaitan dengan penyusunan anggaran. Pada tahap pelaksanaan, berkaitan dengan realisasi dari

anggaran. Kemudian, pada tahap pelaporan dan evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas yang mencakup proses pelaporan dan penilaian kinerja.

Begitupun dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam pelaksanaannya diperlukan proses penganggaran yang baik yang tahapannya disesuaikan dengan anggaran sektor publik. Dengan dilakukannya proses penganggaran, dapat menjadi salah satu sarana bagi pihak sekolah sebagai organisasi sektor publik untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Penganggaran Dana BOS di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|
| Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan dan Evaluasi (Mardiasmo, 2009:61) | 1. Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> ● Program dan AKtivitas ● Penyusunan Anggaran |
| | | 2. Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ● Realisasi Anggaran |
| | | 3. Pelaporan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> ● Akuntabilitas |

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*. Adapun kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahwa semua SDN yang ada di Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut mempunyai sifat yang sama atau homogen. Sehingga, peneliti bermaksud untuk mengambil sampel sebanyak 3 SDN dari 6 SDN yang ada. Karena sifatnya yang homogen, maka dengan 3 SDN pun sudah dapat mewakili sekolah yang lainnya. Dalam hal ini, SDN yang diambil adalah SDN 2 Cipancar, SDN 5 Cipancar, dan SDN 1 Kandang Mukti.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah. Alasan peneliti memilih subjek tersebut karena Kepala Sekolah merupakan pihak yang

terlibat langsung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebut dengan Tim Manajemen BOS Sekolah yang mempunyai peran sebagai penanggungjawab. Kemudian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan, yang menjadi sumber data sekunder adalah data mengenai profil SD dan data mengenai penganggaran Dana BOS yang mencakup pembukuan Dana BOS, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai proses penganggaran dana BOS yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Adapun pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang dianggap dapat mendukung hasil penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa profil SD dan data mengenai penganggaran Dana BOS yang mencakup pembukuan Dana BOS, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan.

3.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas yaitu dengan cara triangulasi. Keabsahan data untuk penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi dengan sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan untuk selanjutnya disesuaikan dengan teori atau ketentuan yang berlaku. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dengan informan pendukung yang berasal dari dokumen Penganggaran Dana BOS di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tahap Perencanaan

4.1.1 Penyusunan Anggaran

Berdasarkan proses wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Sekolah Di SDN 2 Cipancar, SDN 5 Cipancar, dan SDN 1 Kandang Mukti mengenai penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dijelaskan bahwa tahap perencanaan mencakup proses penyusunan RKJM, RKT, dan RKAS.

RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) merupakan dokumen yang didalamnya mencakup rencana program pengembangan sekolah yang disusun untuk empat tahun ke depan. RKT (Rencana Kerja Tahunan) merupakan dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah disusun untuk satu tahun. Kemudian, RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) merupakan dokumen yang berisi program kegiatan, pembelanjaan sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh sekolah. RKAS disusun untuk 1 tahun ke depan.

RKAS mempunyai hubungan yang erat dengan dana Bantuan Operasional Sekolah karena dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu sumber dana di satuan pendidikan yang muatan penggunaannya harus tertuang dalam RKAS. Dalam penyusunan RKAS terdapat pengelompokan sumber dana yaitu dana BOS pusat, provinsi, dan kabupaten. Penyusunan RKAS disusun oleh tim manajemen BOS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Komite dan Operator Sekolah. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam proses penyusunan RKAS adalah menyusun program sekolah serta keuangan sekolah.

Dalam proses penyusunan RKAS dihadiri oleh pihak Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri di lingkungan sekolah yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan sehingga pihak komite sekolah dapat mengetahuinya. Dalam hal ini keterlibatan pihak Komite Sekolah adalah untuk membantu program sekolah. Kemudian, RKAS yang telah dibuat tersebut diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk selanjutnya dilakukan pengesahan.

Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS pada tahun 2018.

4.2 Tahap Pelaksanaan

4.2.1 Realisasi Anggaran

Berdasarkan proses wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Sekolah Di SDN 2 Cipancar, SDN 5 Cipancar, dan SDN 1 Kandang Mukti mengenai penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dijelaskan bahwa tahap pelaksanaan terdiri dari penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan dana, pembelanjaan dana, pembukuan dana, dan pengembalian kelebihan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah setiap triwulan dengan persentase 20% untuk triwulan I, III, dan IV, 40% dari dana alokasi per tahun untuk triwulan II. Banyaknya jumlah dana yang diterima oleh sekolah dihitung dari sejumlah siswa yang ada di Dapodik x Rp 800.000 per tahun. Dana tersebut diambil ke bank BJB melalui rekening sekolah. Pengambilan dana tersebut dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dana yang telah diambil kemudian digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan yang tercantum dalam RKAS. Dana tersebut sebanyak 20% digunakan oleh pihak sekolah untuk membeli buku teks utama. Pihak sekolah mengakui bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima sudah dapat memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah.

Dalam aktivitas pembelian terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, pihak sekolah selalu mempertimbangkannya dengan membuat skala prioritas. Pihak sekolah juga selalu menyertakan bukti pembelian barang/jasa yang sah seperti nota dan kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara dan kepala Sekolah dalam mekanisme pembeliannya. Semua aktivitas atau kegiatan transaksi yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah, pihak sekolah selalu melakukan pencatatan yang biasa disebut dengan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara. Ada beberapa pembukuan yang dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya ada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Bank, Buku Pajak, dan Buku Inventaris. Proses pembukuan dilakukan sebulan sekali dengan cara mencatat barang-barang yang sudah dibeli di buku kas umum. Selanjutnya, untuk kelengkapan administrasi, pihak sekolah tidak lupa untuk melakukan pengarsipan.

Pihak sekolah selalu menerima dana Bantuan Operasional sesuai dengan yang seharusnya. Artinya, tidak ada kelebihan dana sehingga pihak sekolah tidak perlu melakukan pengembalian dana. Namun, jika pihak sekolah menemukan adanya kelebihan dana Bantuan Operasional, maka pihak sekolah akan menyetor kelebihan tersebut ke rekening kas daerah oleh bank. Proses pengembalian tersebut dilakukan setiap akhir triwulan sekali.

Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS pada tahun 2018.

4.3 Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Berdasarkan proses wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Sekolah Di SDN 2 Cipancar, SDN 5 Cipancar, dan SDN 1 Kandang Mukti mengenai penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dijelaskan bahwa setelah pihak sekolah menerima dan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah, selanjutnya pihak sekolah akan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dalam hal ini, pihak yang terlibat diantaranya adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, dan Operator Sekolah. Pelaporan yang telah dibuat disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit. Selain itu, laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan laporan *online* ke Laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>.

Proses publikasi terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah juga dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara disampaikan pada rapat sekolah yang dihadiri juga oleh pihak komite sekolah.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah diawasi oleh komite sekolah dan Inspektorat. Pengawasan tersebut dilakukan setahun sekali dengan memeriksa SPJ triwulan I sampai triwulan IV. Selain melakukan pengawasan, tim Inspektorat juga melakukan evaluasi yang dilakukan pada triwulan ke IV. Proses evaluasi tersebut dilakukan dengan cara mengambil beberapa Laporan Pertanggungjawaban dari beberapa sekolah. Jika proses evaluasi sudah dilakukan maka pihak sekolah menindaklanjutinya dengan melengkapi pelaporan jika ada yang kurang.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait dengan penganggaran dana BOS di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut bahwa dalam penganggaran Dana BOS terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

1. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun rencana anggaran yang tertuang dalam RKJM, RKT, dan RKAS.
2. Pada tahap pelaksanaan, sekolah menggunakan dana sesuai dengan apa yang direncanakan dan tertuang dalam RKAS.
3. Pada tahap pelaporan dan evaluasi, sekolah membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan ke laman BOS di <http://bos.kemdikbud.go.id>.

Ketiga tahapan tersebut secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang termuat dalam petunjuk teknis BOS pada tahun 2018. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penganggaran Dana BOS di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut dapat dikatakan baik.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang Analisis Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Ranting Cipancar UPT Pendidikan Kecamatan Leles Kabupaten Garut , maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah

Dalam upaya meningkatkan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada tahap pelaporan, pihak sekolah disarankan untuk selalu mengupdate data ke Dapodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar perhitungan antara jumlah siswa sesuai dengan dana BOS yang akan diterima.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menambah jumlah sampel dan responden sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri, A. 2014. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Bahana Manajemen Pendidikan 2* : 33-831.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bahana/article/viewFile/3753/2988>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Ikhtisar Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Jakarta: Author.
- Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta: Author.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Silele, E., Sabijono, H., & Pusung, R.J. 2017. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal EMBA 5* : 1626-1635.
<https://media.neliti.com/media/publications/128486-ID-evaluasi-pengelolaan-dana-bantuan-operas.pdf>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini. 2017. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemas I Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan 12* : 153-160.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jmp/article/view/5528>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
<http://repositori.kemdikbud.go.id/10379/1/Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2019.pdf>
- Hidayat, S. 2013. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang*. Skripsi.
<https://lib.unnes.ac.id/17784/1/3401408076.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud137-2014StandarNasionalPAUD.pdf>

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/644/se-nomor-9031043sj>